

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Program Kota Tanpa Permukiman Kumuh (KOTAKU) dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki kawasan perkotaan dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, perbaikan permukiman kumuh, pencegahan pembentukan permukiman kumuh baru, dan berkelanjutan dalam implementasinya. Istilah "pembangunan" berasal dari kata "bangun", yang mengandung makna sadar, terjaga, dan berdiri. Menurut Raharjo, pembangunan merupakan suatu proses yang disengaja dan terencana untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan menjadi keadaan yang diinginkan. Pembangunan didefinisikan sebagai upaya yang terprogram dan terencana secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu berupaya keras dalam proses pembangunan untuk memastikan kelangsungan hidupnya, baik untuk masa kini maupun masa depan.

Kehidupan yang baik menjadi damba masyarakat adalah kondisi sejahtera. Oleh karena itu, upaya utama dalam meningkatkan kondisi sejahtera adalah mengatasi rendahnya taraf hidup. Salah satu tantangan utama dalam mencapai hal ini adalah kemiskinan dan segala dampaknya, yang merupakan gambaran dari kesejahteraan yang rendah. Secara umum, kota dimulai dari pemukiman kecil yang strategis secara spasial untuk berbagai kegiatan sosial. Pembangunan perkotaan adalah transformasi suatu kota dari satu keadaan ke keadaan lain dalam waktu yang bervariasi. Proses ini biasanya dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan padat, meningkatnya kepadatan permukiman, serta ekspansi wilayah terbangun terutama dalam konteks pemukiman yang semakin meluas dan lengkap dengan fasilitas perkotaan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi kota.

Pembangunan adalah aspek yang vital dan kompleks, melibatkan berbagai dimensi. Pada intinya, pembangunan melibatkan proses perbaikan yang memerlukan perencanaan yang matang untuk menghadapi perubahan yang berkelanjutan. Ini mencakup kemampuan suatu perekonomian yang awalnya statis untuk mengalami transformasi dan menciptakan kondisi sosial yang lebih baik. Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan

kumuh perkotaan, dengan tujuan mendukung terciptanya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan dinilai melalui pengembangan indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan program. Diharapkan bahwa program ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menghapuskan permukiman kumuh di perkotaan.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan permasalahan yang serius karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan bertambahnya permukiman kumuh dan kemudian timbulnya berbagai permasalahan sosial yang berada di luar kendali kemampuan pemerintah kota dalam menangani permasalahan tersebut sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Pada saat yang sama, pesatnya urbanisasi yang begitu tinggi menyebabkan permasalahan pembangunan dalam hal ini penyediaan ruang hidup menjadi semakin mendesak terutama di wilayah perkotaan. Ponorogo melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perkotaan yang terpinggirkan, serta mendorong pengembangan permukiman perkotaan yang memenuhi taraf hidup yang bermartabat, produktif, dan berkelanjutan. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk secara aktif mengatasi permasalahan permukiman kumuh dan memastikan tersedianya perumahan yang layak bagi masyarakat.

Melalui program ini akan dilaksanakan model pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur layanan esensial dalam mengatasi permukiman kumuh. Program ini dilaksanakan di 21 titik di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo, termasuk di Kelurahan Tonatan. Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah memimpin seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan permukiman. Sementara itu, di tingkat kecamatan/kelurahan, kelompok kesejahteraan dan pemangku kepentingan lainnya berpartisipasi aktif dan berperan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan kumuh di wilayahnya. Pengelolaan permukiman kumuh memerlukan kolaborasi yang melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait untuk memobilisasi sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, serta keterlibatan perguruan tinggi swasta dan kelompok pendamping lainnya. melalui integrasi program yang ada.

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman di wilayahnya, dengan tujuan menghilangkan

seluruh permukiman kumuh. Selain fokus pada penanggulangan permukiman kumuh, masalah kemiskinan juga menjadi prioritas, sehingga diperlukan skenario perencanaan yang dapat mengurangi beban bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR mengacu pada penduduk dengan keterbatasan daya beli yang memerlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Permasalahan utama di Kelurahan Tonatan adalah permasalahan banjir. Sebab, pemukiman tersebut terletak di dekat sungai dan sistem drainase air hujan yang kurang memadai. Faktanya, masih banyak jalan lingkungan yang belum dilengkapi saluran drainase. Kondisi drainase saat ini sangat rusak akibat pekerjaan konstruksi dan sedimentasi, sehingga sistem drainase air hujan tidak maksimal sehingga menyebabkan banjir. Berdasarkan dari rembug dengan warga, peralatan dan berdasarkan hasil rona awal serta hasil analisis yang ditumpangkan, diperoleh konsensus bahwa wilayah sempadan kumuh di desa Tonatan adalah Krajan RT 2/1, Krajan RT 2/2, Ampeyan RT 1/3 dan Krajan RT 3/2, Ampeyan RT 1/2 dan Krajan RT 1/1. Permasalahan permukiman kumuh di wilayah demarkasi adalah kondisi permukiman di tepi sungai yang sebagian memunggungi sungai dan letaknya tidak jauh dari sungai. Kondisi ini diperparah dengan warga yang membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai dan juga penggunaan toilet. Tentu saja hal ini berdampak buruk terhadap lingkungan, mencemari sungai-sungai di sekitar pemukiman.

Penataan permukiman merupakan langkah penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang seringkali menjadi penyebab munculnya kawasan kumuh. Untuk mencapai tujuan ini, perencanaan yang matang sangat diperlukan. Rencana ini harus mencakup strategi yang efektif untuk memperbaiki kondisi permukiman dan mengatasi faktor-faktor penyebab kumuhnya kawasan tersebut. Salah satu aspek kunci dalam perencanaan ini adalah adanya kesepakatan bersama di antara berbagai pihak yang terlibat. Penanganan kawasan kumuh dan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan; diperlukan integrasi dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta kelompok swadaya masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses ini. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam merancang dan menerapkan solusi. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, rencana yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, serta lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Integrasi semua

pihak ini memastikan bahwa upaya penanganan kawasan kumuh menjadi lebih komprehensif dan efektif, mengarah pada perbaikan kondisi permukiman dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Beberapa penelitian terdahulu yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian para ahli, yaitu efektivitas keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan serta partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif ini tidak hanya mencakup pengetahuan dan sikap terhadap program KOTAKU, tetapi juga melibatkan tindakan konkret dari masyarakat. Untuk mendorong partisipasi aktif ini, diperlukan rekayasa sosial yang efektif. Ini melibatkan penciptaan model sosialisasi yang efisien serta upaya untuk memotivasi masyarakat agar terlibat secara aktif dalam implementasi program KOTAKU (Indria & Risdiyanto, 2019).

Kedua, permasalahan permukiman kumuh muncul akibat kegagalan pembangunan dan penataan permukiman akibat kepadatan penduduk yang tinggi. Kegagalan pembangunan menyebabkan terciptanya lingkungan kumuh dengan fasilitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun strategi pembangunan untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh dan mengembangkan infrastruktur perumahan. Strategi atau upaya pemerintah tersebut diwujudkan dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Permukiman Kumuh), yang mendukung pemerintah daerah menjadi jagoan dalam menangani permukiman kumuh (Dyah Nawang Wulan & Widodo, 2020).

Ketiga tata kelola kolaboratif dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Permukiman Kumuh) disebabkan oleh kompleksitas dan keterbatasan pemerintah dalam menyikapi permasalahan masyarakat, karena pemerintah tidak dapat menangani permasalahan permukiman kumuh sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama menghilangkan permukiman kumuh di Indonesia. Dengan mengembangkan konsep tata kelola kolaboratif, pemerintah berharap dapat memperoleh dukungan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta dan masyarakat (Sulaiman, 2021).

Perbedaan antara penelitian yang telah saya ambil dengan penelitian sebelumnya terlihat jelas dalam fokus dan pendekatan yang digunakan masing-masing studi. Penelitian pertama, berfokus pada efektivitas media sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana berbagai metode komunikasi dapat memengaruhi sejauh

mana masyarakat terlibat dalam program tersebut, menganalisis saluran informasi yang digunakan untuk menarik perhatian dan partisipasi publik.

Penelitian kedua mengidentifikasi masalah permukiman kumuh yang timbul akibat kepadatan penduduk tinggi. Fokus dari penelitian ini adalah pada bagaimana kepadatan penduduk berkontribusi pada kondisi permukiman kumuh, termasuk dampak negatif pada kualitas hidup dan infrastruktur. Penelitian ini mengeksplorasi masalah spesifik yang muncul dari kepadatan tinggi, dan bagaimana kondisi tersebut memperburuk masalah permukiman kumuh.

Penelitian ketiga membahas kolaborasi dalam tata kelola sebagai upaya penanggulangan permukiman kumuh dalam program KOTAKU. Penelitian ini menilai bagaimana berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja bersama untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. Ini mencakup analisis mengenai bagaimana koordinasi dan kerjasama antar berbagai entitas dapat mempengaruhi efektivitas program dan hasil yang dicapai. Sementara itu, penelitian Anda memusatkan perhatian pada implementasi program KOTAKU sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Tonatan. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana program tersebut diterapkan secara langsung di lapangan, mengamati keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan bagaimana infrastruktur yang dibangun melalui program ini mempengaruhi komunitas lokal. Penelitian ini menyelidiki tantangan yang dihadapi selama implementasi, serta dampak konkret dari pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup dan lingkungan masyarakat setempat.

Dengan demikian, setiap penelitian menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji aspek-aspek seperti sosialisasi, kepadatan penduduk, dan kolaborasi tata kelola, sedangkan penelitian Anda berfokus pada aspek praktis dari pelaksanaan program dan dampaknya di lapangan. Perbedaan fokus ini menunjukkan kedalaman dan kompleksitas yang berbeda dalam memahami serta meningkatkan efektivitas program-program pembangunan seperti KOTAKU.

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan bahwa program Kota Tanpa Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti yang dijelaskan, kesehatan yaitu menurut (Usfita, 2022) Kesehatan lingkungan merupakan bagian penting dari ilmu kesehatan masyarakat yang secara khusus mempelajari serta mengatasi interaksi antara manusia dan lingkungannya

dalam konteks menjaga keseimbangan ekologi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan derajat kesehatan serta mencapai kehidupan yang sehat secara optimal. Menurut pendapat para ahli yang kedua menurut (Hardiana, 2018) kebersihan adalah kondisi di mana lingkungan terlihat bersih, sehat, dan menarik. Kebersihan lingkungan adalah hak dasar bagi setiap individu untuk mencapai kesehatan dalam kehidupannya. Setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Terdapat perbedaan antara pendapat kedua ahli tersebut yaitu yang pertama membahas tentang apa itu kesehatan lingkungan dan menurut pendapat ahli yang kedua membahas tentang kebersihan lingkungan.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya, terutama terkait dengan fokus pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini bertujuan untuk menjadi model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang mengedepankan pembangunan pemukiman yang bersih dan sehat. Hal ini memotivasi saya sebagai peneliti untuk mengambil judul penelitian mengenai implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo.

Penelitian yang saya ambil memiliki fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, terutama dalam hal implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek dari program ini, termasuk efektivitas media sosialisasi, permasalahan permukiman kumuh yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, serta kolaborasi dalam tata kelola program. Namun, penelitian Anda mengambil pendekatan yang lebih terfokus pada pelaksanaan praktis dari program KOTAKU dan bagaimana program ini diterapkan sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo.

Keunikan penelitian yang saya ambil terletak pada bagaimana mengeksplorasi implementasi langsung dari program KOTAKU di lapangan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana program tersebut diterapkan di tingkat lokal, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, serta memantau dampak konkret dari pembangunan infrastruktur terhadap komunitas setempat. Dengan kata lain, penelitian saya tidak hanya membahas teori atau kebijakan di balik program, tetapi juga menilai hasil praktis dan real-world yang dihasilkan dari penerapan program tersebut.

Penelitian ini penting karena memberikan perspektif yang lebih terfokus dan aplikatif mengenai bagaimana KOTAKU berfungsi dalam konteks spesifik Kelurahan Tonatan. Ini membantu memahami bagaimana model pembangunan berbasis masyarakat dapat diadaptasi dan diterapkan di berbagai daerah, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dan pelaksanaan proyek dapat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas program tersebut. Dengan mengangkat topik ini, Anda berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang praktik lapangan dalam implementasi program pembangunan berbasis masyarakat dan bagaimana hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan infrastruktur mereka.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo.
2. Mendeskripsikan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

### 2. Manfaat Praktis :

#### a. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan kebijakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan baik dan dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

#### b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kebijakan yang baik dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

#### c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi adik kelas nanti yang akan menyusun skripsi dan bisa dijadikan rujukan dan teknik penulisannya bisa menambah khasanah bagi peneliti.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah serangkaian langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Proses ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam tindakan operasional yang nyata, dengan upaya mencapai perubahan yang signifikan atau kecil sesuai dengan keputusan awal. Secara esensial, implementasi melibatkan pemahaman tentang hasil yang diharapkan setelah suatu program atau keputusan dijalankan. Ini merupakan aktivitas yang terfokus pada menyelesaikan tugas dengan menggunakan alat atau metode tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Febrianti Fauzi et al., 2022).

### **2. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Kota Tanpa Kumuh atau disingkat sebagai KOTAKU, adalah program yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi atau menghilangkan kawasan kumuh di berbagai kota besar di Indonesia. Tujuan utama dari program KOTAKU adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dengan cara memberikan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan layak huni, air bersih, sanitasi, dan aksesibilitas transportasi. Program KOTAKU dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, serta masyarakat setempat. Fokus utama dari program ini adalah rehabilitasi dan revitalisasi kawasan kumuh, serta pengembangan permukiman yang layak secara fisik dan sosial. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam program KOTAKU adalah dengan memberikan bantuan dan fasilitas kepada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh untuk memperbaiki kondisi hunian mereka. Secara keseluruhan, KOTAKU bertujuan untuk menciptakan kota-kota yang lebih bersih, lebih teratur, dan lebih berdaya saing, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan secara keseluruhan.

### **3. Infrastruktur**

Pengertian Infrastruktur, menurut (Suryatin et al., 2019). Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, drainase, bangunan, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam konteks ini, infrastruktur dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai sarana dan prasarana yang saling terkait.

Infrastruktur dalam suatu sistem ini mendukung baik sistem sosial maupun sistem ekonomi, serta memberikan akses terhadap sistem lingkungan.

## F. Landasan Teori

### 1. Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin (Alam & Madani, 2021). Implementasi mengacu pada proses yang terjadi setelah undang-undang mengesahkan suatu program, kebijakan, manfaat, atau hasil nyata lainnya. Hal ini mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pernyataan niat pejabat pemerintah mengenai tujuan program dan hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, implementasi melibatkan tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai aktor, khususnya birokrat, untuk menjalankan program.

Selanjutnya menurut (Kurnianingtyas & Sri Suwitra, 2018). Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di lingkungan pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya disebut sebagai implementasi kebijakan. Proses ini melibatkan langkah-langkah untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu. Implementasi ini berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai perubahan baik besar maupun kecil sesuai dengan keputusan politik yang ada. Proses implementasi melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, dengan fokus utama untuk mencapai hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan dari kebijakan yang diterapkan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mencantumkan 7 (tujuh) indikator yang menggambarkan keberadaan permukiman kumuh sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung, hal ini dilihat dari aspek ketidakteraruran bangunan, kepadatan bangunan, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.
- b. Jalan lingkungan, hal ini dilihat dari aspek cakupan jaringan pelayanan, kualitas permukiman jalanan.
- c. Air minum, hal ini dilihat dari aspek ketidaksediaan akses aman air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.

- d. Drainase lingkungan, hal ini dilihat dari aspek ketidatersediaan drainase serta kualitas konstruksi drainase.
- e. Pengelolaan air limbah, hal ini dilihat dari aspek sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis.
- f. Pengelolaan persampahan, hal ini dilihat dari aspek prasarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis.
- g. Proteksi kebakaran, hal ini dilihat dari aspek ketidaktersediaan sistem proteksi kebakaran secara aktif dan pasif.

Ketujuh indikator diatas merupakan indikator klasifikasi tingkat kekumuhan suatu wilayah. Program KOTAKU merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mempercepat penangan kawasan kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100” (Zebua, 2021).

## 2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menurut (Latif et al., 2020) merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur sangat penting dalam menyediakan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indikator Pembangunan Infrastruktur menurut (Mustanir & Abadi, 2017) adalah

- a. Koordinasi merupakan keterpaduan antara pelaku pembangunan baik dalam institusi pemerintahan sendiri maupun pemerintahan antara pihak swasta dan masyarakat secara cepat dan efisien.
- b. Sinkronasi adalah untuk mendorong proses pembangunan secara cepat dan efisien.
- c. Konsistensi adalah untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula, perlu dijamin semaksimal mungkin terdapatnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

- d. Partisipasi adalah bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam perencanaan.
- e. Sumber daya secara efisien, efektif dan adil adalah tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan dalam literatur adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya, baik dana dan tenaga secara efektif, efisien dan adil.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan pengertian istilah-istilah yang menjelaskan secara operasional penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Hal ini diungkapkan oleh Komaruddin (1994: 29): “Yang dimaksud dengan istilah adalah pengertian suatu istilah secara keseluruhan yang mencakup seluruh unsur yang menjadi ciri utama istilah itu.”

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pengertian operasional dalam penelitian. Definisi inilah yang menjadi dasar untuk merinci kisi-kisi instrumen penelitian. Nazir (1999:152) menyatakan bahwa: Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberi makna, menentukan kegiatan, atau memberikan operasionalisasi yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk atau variabel tertentu yang diperlukan.

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan perbedaan pemahaman antara peneliti dan orang yang membaca penelitiannya. Untuk menghindari kesalahpahaman, definisi operasional dibuat dalam sebuah penelitian. Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka akan diuraikan definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di bawah ini, antara lain:

- a) Kotaku yaitu sebuah program pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan / pemukiman, khususnya di daerah perkotaan.
- b) Implementasi yang berarti pelaksanaan atau penerapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu meliputi :
  - 1) Tersedianya saluran drainase yang memadai

- 2) Adanya sarana dan prasarana persampahan
- 3) Ketersediaan akses aman air minum
- 4) Jalan lingkungan yang memadai.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan realitas empiris di balik suatu fenomena secara mendalam, detail, dan lengkap. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mempertemukan kenyataan empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (MUDIYANT, 2016).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang artinya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang sedang terjadi. Metode ini berupaya menggambarkan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan informasi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Tujuan dari metode deskripsi ini juga untuk mencoba memecahkan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan objek atau subjek dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada atau temuan faktual.

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena kelurahan Tonatan sudah menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai model pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), sehingga saya tertarik untuk meneliti program ini.

### **3. Penentuan Informan**

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informan untuk penelitian ini. Teknik purposive sampling menempatkan informan pada elemen atau individu tertentu yang paling mungkin memahami data yang diperlukan. Berikut ini informan yang telah ditentukan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kepala Kelurahan Tonatan

- 2) Pendamping program KOTAKU
- 3) Ketua Tim pelaksana program KOTAKU
- 4) Tim pelaksana program KOTAKU
- 5) Masyarakat Kelurahan Tonatan yang berdampak program KOTAKU 6 RT

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

- Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis dengan fenomena yang diteliti. Sebab cara ini paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia ilmiah saja, namun juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum observasi berarti mengamati, melihat. Sedangkan khusus observasi.

- Wawancara

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara mendalam antara peneliti dan responden mengenai masalah atau fokus peneliti. Wawancara sering juga disebut wawancara lisan atau kuisioner. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara berupa wawancara bebas terpimpin. Wawancara dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Wawancara terstruktur yang mengacu pada situasi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah diterapkan dengan kategori jawaban kepada setiap responden.
2. Wawancara tidak terstruktur mengacu pada pemahaman perilaku responden yang kompleks tanpa menetapkan kategori yang membatasi.

- Dokumentasi

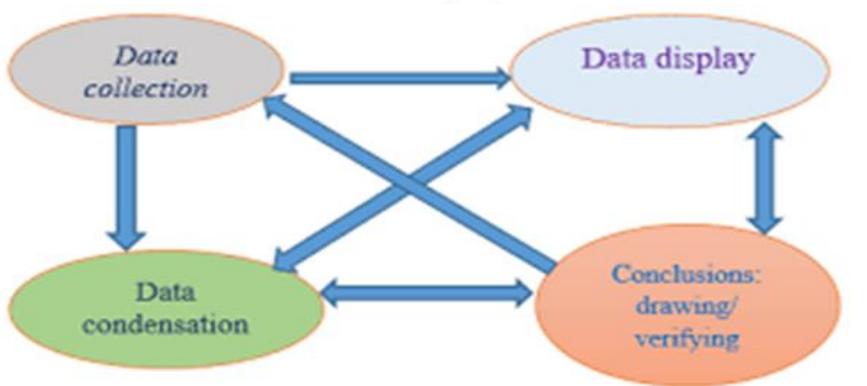
Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan berupa data dari dokumen baik dalam bentuk catatan, gambar maupun dokumen dalam bentuk lain yang berkaitan dengan pelaksanaan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumen, peraturan, notulensi rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data meliputi proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan juga rekomendasi kemudian diambil kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis dan pembaca.

Salah satu model analisis data dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisi data :

Gambar 1. 1 Skema Proses Analisis Data



Sumber : (Sugiyono, 2015)

Metode Analisis Data Kualitatif Model Interaktif sumber : Sugiyono, 2015

- a. Data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui wawancara dan observasi lalu disesuaikan dengan masalah penelitian untuk mendukung hasil dan pembahasan.
- b. Setelah pengumpulan data dilakukan seleksi untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga ditemukan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Setelah data terkumpul dilakukan seleksi untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat ditemukan.
- d. Setelah data terkumpul dilakukan seleksi untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat ditemukan.

## 6. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data (Lexy J. Moleong:1991)

1. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (crebelity). Teknik ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrument / alat tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
  - b. Ketentuan pengamatan, yaitu untuk menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dari situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan demikian maka perpanjangan keikutsertaan meyediakan lingkup, sedangkan ketekunan pengamatan meyediakan kedalaman.
  - c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.
  - d. Kecukupan refensial yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data.
2. Teknik pemeriksaan keterahlian (transferability) dengan cara uraian rinci. Teknik ini meneliti agar laporan hasil fokus penelitian dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan kontek tempat penelitian diadakan. Uraianya harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar mereka dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.
3. Teknik pemerisaan ketergantungan (dependability) dengan cara auditing ketergantungan. Teknik ini tidak dapat dilaksanakan bila tidak dilengkapi dengan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian. Pencatatan itu diklarifikasi dari data mentah sehingga formasi tentang pengembangan instrument sebelum auditing dilakukan agar dapat mendapatkan persetujuan antara auditor dan audit terlebih dahulu. Selain itu agar data yang diperoleh benar-benar obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan data dengan metode triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data.